

**NASKAH PUBLIKASI**  
**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO**  
**NOMOR 63 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI**  
**DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**  
**(Studi UMKM Tomira Di Kabupaten Kulon Progo)**



Oleh :

Yuliana Setiyawati

1500024063

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**  
**dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**YOGYAKARTA**

**2019**

**JOURNAL**

**THE IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE REGENT  
OF KULON PROGO NO 63 OF 2010 REGARDING THE  
EMPOWERMENT OF MICRO SMALL AND MEDIUM  
ENTERPRISES AND COOPERATIVES**

**(A Study on Micro Small and Medium Enterprises (UMKM)  
Tomira in Kulon Progo Regency)**



Written by :

Yuliana Setiyawati

1500024063

**This Thesis Submitted as a fulfillment of the requirements  
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 63 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(Studi UMKM Tomira Di Kabupaten Kulon Progo)**

**Yuliana Setiyawati**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengatur Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berupa TOMIRA; (2) Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah TOMIRA dengan toko modern di Kabupaten Kulon Progo; (3) Untuk mendapatkan solusi yang tepat guna mengatasi kendala dalam pelaksanaan kerjasama UMKM TOMIRA dengan toko modern.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sistem pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Studi Pustaka dan Wawancara Terpimpin. Informan dari penelitian ini ialah pegawai Dinas Koperasi dan UMKM bagian Penyuluhan Koperasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah diaktualisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan berwujud toko modern Tomira, namun meski telah terealisasi wujud dari kebijakan pemerintah tersebut, masih banyak kendala-kendala dalam pelaksanaannya, sehingga pemberdayaan masyarakat lokal belum terlaksana secara maksimal.

**Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Pemberdayaan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

**THE IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE REGENT  
OF KULON PROGO NO 63 OF 2010 REGARDING THE  
EMPOWERMENT OF MICRO SMALL AND MEDIUM  
ENTERPRISES AND COOPERATIVES  
(A Study on Micro Small and Medium Enterprises (UMKM)  
Tomira in Kulon Progo Regency)**

**Yuliana Setiyawati**

**ABSTRACT**

The study is to investigate the implementation of the Regulation of the Regent no. 63 of 2010 executed by the Government of Kulon Progo Regency in empowering the micro, small, and medium enterprises (UMKM) and cooperatives in the form of People's Store (*Toko Milik Rakyat*, TOMIRA). Besides, it is also to investigate the problems occur in the partnership of UMKM TOMIRA and modern retailer in Kulon Progo Regency, as well as obtaining the appropriate solutions for the problems therein.

This study implemented qualitative research method, which is meant to completely comprehend the phenomena occur in or experienced by the research subject by describing them in words, in a particular natural context. Various natural methods of communication are also applied here. The data of this study were collected through library research and structured interview. The interviewees were the staffs of the cooperative service and cooperative counseling of the UMKM.

It can be concluded that the implementation of the regulation of the regent no. 63 of 2010 regarding the empowerment of micro, small, and medium enterprises (UMKM) and cooperatives has been realized by the Government of Kulon Progo Regency in the form of modern store TOMIRA (People's Store). However, a number of problems still occurred in the implementation, thus, the empowerment of local community has not been managed optimally.

***Keywords: Implementation, Regulations of the Regent, Empowerment, Cooperatives, Micro Small and Medium Enterprises***

## **A. PENDAHULUAN**

Menciptakan kesejahteraan bagi warga negara merupakan tugas pertama dan utama setiap pemerintahan, yang mana pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dalam perekonomian untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya. dapat kita lihat terkait pembangunan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adil dan makmur yang merata serta melatih prinsip-prinsip dasar yang harus berpedoman guna menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas nasional.

Usaha mikro, kecil, dan menengah telah disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3 bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional serta bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam

rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 adalah 35.457 unit dengan pertumbuhan 6,20% sesuai data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo 2019. Untuk itu, guna mengakomodir pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah Kabupaten Kulon Progo sekaligus penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, maka Pemerintah Daerah memegang peran besar dalam penciptaan kondusifitas iklim usaha yang salahsatu indikatornya adalah dengan mengimplementasikan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pada saat ini pertumbuhan pembangunan toko modern semakin pesat, bahkan minimarket modern berjejaring seperti Indomaret dan Alfamart lokasinya bersebelahan. Maraknya pendirian toko modern berjejaring yang semakin meningkat menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah dan pengusaha kecil, pendirian toko modern berjejaring tersebut seringkali dianggap menyaingi pasar-pasar tradisional maupun toko kelontong milik masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dikuatkan dengan Peraturan

Daerah Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan toko modern, salahsatunya adalah Toko Milik Rakyat atau yang sering disingkat dengan Tomira, Tomira merupakan minimarket modern kombinasi antara Alfamart dengan koperasi yang bertujuan untuk melindungi produk-produk lokal dengan mewajibkan paling sedikit 80% produk UMKM untuk dipasarkan di Tomira dan barang-barang Alfamart paling banyak 15% dari keseluruhan jumlah dagangan yang dijual didalam outlet/gerai toko modern tersebut sesuai Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) serta menumbuhkan iklim usaha yang baik, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjamin UMKM, kemitraan dan pemberdayaan UMKM. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki nilai strategis dalam memperkuat perekonomian rakyat yang nantinya dapat mengapai kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan taraf hidup dan daya saing. Namun apakah pemerintah Kulon Progo telah memberikan kontribusi dan perhatian penuh kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap seberapa jauh Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Kulon Progo terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di

Kabupaten Kulon Progo dan mengangkat hal tersebut dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 63 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH** (Studi UMKM Tomira Di Kabupaten Kulon Progo)”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2010 oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengatur Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang berupa TOMIRA?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama UMKM TOMIRA dengan toko modern di wilayah Kabupaten Kulon Progo?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala pelaksanaan kerjasama UMKM TOMIRA dengan toko modern?

## **C. PEMBAHASAN**

1. **Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2010 oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengatur Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang berupa TOMIRA**

Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur terkait kemitraan, yang



menjelaskan bahwa kemitraan adalah *“kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar”*, sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 menerangkan *“Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Koperasi dan UMKM adalah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”*.

**a. Peran Strategis Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Bahwa peran Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo sebagai pelaku usaha mempunyai kedudukan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, serta sebagai sektor pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja. Salahsatu wujud kebijakan dari Peraturan Daerah yang dirintis oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan menggandeng koperasi dan pelaku UKM ialah toko modern Tomira. Keberadaan toko modern Tomira berawal dari adanya pengaturan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional

yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2010 berperan penting sebagai cikal bakal atas terealisasinya UMKM toko modern Tomira.

Tomira atau Toko Milik Rakyat, merupakan toko modern yang dimiliki oleh koperasi yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Koperasi dipilih sebagai bentuk pelaku usaha yang berasal dari masyarakat, sehingga diharapkan kesejahteraan rakyat dapat meningkat melalui toko modern Tomira, mengingat koperasi dalam menjalankan toko modern Tomira turut serta melibatkan pelaku UKM Kabupaten Kulon Progo sebagai *supplier* produk lokal, hal ini sejalan dengan prinsip dan tujuan pemberdayaan yang tertuang dalam BAB II Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2010.

**b. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Koperasi dan UMKM**

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2010 tertuang bentuk pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu : Pembinaan Kelembagaan, Pembinaan Usaha, dan Pembiayaan. Dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2010 menjelaskan pengertian pembinaan adalah upaya yang

dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM. Dalam pendirian UMKM toko modern Tomira pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan koperasi khususnya terkait konsep daripada toko modern Tomira, disamping itu pemerintah daerah juga bertugas untuk mengawasi koperasi dalam menjalankan toko modern Tomira.

**2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama UMKM Tomira dengan toko modern di wilayah Kabupaten Kulon Progo**

**a. Kendala kerjasama antara koperasi “Toko Modern Tomira” dengan *supplier* (Alfamart dan Indomaret)**

- 1) Pemasangan liar tulisan “Alfamart maupun Indomaret” oleh *supplier* (Alfamart dan Indomaret)

Koperasi telah memberikan ruang “Alfamart dan Indomaret” sebagai penyedia barang (*supplier*) dan ciri khas warna (biru-merah) yang identik dengan toko modern sebelumnya masih dibiarkan menempel pada toko modern Tomira, namun tulisan “Alfamart” masih terpasang di toko modern Tomira, tulisan tersebut masih terpasang baik di pintu masuk, pada seragam karyawan Tomira, bahkan ada

dimana tulisan “Alfamart” tersebut lebih besar, sedangkan tulisan “Tomira” lebih kecil. Hal itu juga seringkali ditemui pada baliho depan toko modern Tomira. Jelas hal tersebut bertentangan dengan tujuan daripada peraturan daerah mengenai pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

## 2) Minimnya Sumber Daya Manusia

Mengingat bahwa Tomira sebelumnya merupakan toko modern Alfamart dan Indomaret, hal ini berimbas pada minimnya pengetahuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Tomira, karena sebelumnya konsep toko modern di Kabupaten Kulon Progo berstatus waralaba (*franchise*), sedangkan sekarang telah dipegang oleh koperasi, maka terdapat perbedaan pembukuan antara Tomira yang berkonsep pembukuan koperasi dengan pembukuan konsep waralaba, karena standar penyajian laporan keuangan koperasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta adanya aturan perkoperasian sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kendala ini yang membuat sumber daya manusia dari koperasi mengalami kesulitan dalam penyajian laporan keuangan. Sehingga sering terjadi ketidak sesuaian setelah dilakukan pelaporan kepada pihak koperasi selaku pemilik Tomira.

**b. Kendala kerjasama antara koperasi “Toko Modern Tomira” dengan UKM di wilayah Kabupaten Kulon Progo**

**1) Ketersediaan Bahan Baku**

Produk lokal yang diolah oleh pelaku UKM kebanyakan berupa makanan, dalam mengelola produk makanan tersebut mereka para pelaku UKM membuat produk yang unik, yang dimaksud unik disini adalah bahan baku yang banyak tumbuh di daerah mereka (pelaku UKM) masing-masing. Kendala datang ketika bahan baku yang tadinya banyak, menjadi sulit dicari pada musim tertentu, hal ini kadangkala membuat pelaku UKM kesulitan dalam memproduksi produk yang akan dijual di toko modern Tomira, sehingga kendala pada ketersediaan bahan baku tersebut pelaku UKM mengalami penurunan ketersediaan produk, bahkan ada insiden dimana pelaku UKM tidak melakukan produksi selama 2 minggu.

Selain sulitnya ketersediaan bahan baku, pelaku UKM yang mencoba mencari alternatif lain dengan membeli bahan baku pada tempat lain pun tak kalah membuat pelaku UKM mengeluh, karena mahalnya bahan baku yang didapatkan. Dampak macetnya produksi oleh pelaku UKM jelas berimbas pada menurunnya ketersediaan produk lokal di toko modern Tomira, sedangkan produk yang

telah masuk ke toko modern sebagaimana juga Tomira, hakikatnya bersifat kontinu atau terus menerus atau konsisten, sehingga jangan sampai mengalami penurunan jumlah produk ataupun kekosongan, kendala seperti ini yang sering dialami oleh para pelaku UKM dalam menjalin kerjasama dengan toko modern Tomira.

2) Ruang sebesar 20% bagi produk lokal

Bahwa awal pendirian toko modern Tomira, pemerintah daerah memiliki semangat tinggi akan dapat diperdagangkannya produk lokal Kabupaten Kulon Progo sebanyak 20% dari seluruh produk yang diperdagangkan di dalam setiap toko modern Tomira yang ada di Kulon Progo, agar produk lokal tersebut dapat dikenal masyarakat serta roda perekonomian yang baik bagi pelaku UKM, produk lokal sebanyak 20% itu akan diberikan rak tersendiri di dalam toko modern Tomira. Perlu diketahui bahwa ruang sebesar 20% bagi produk lokal termuat dalam perjanjian kerjasama koperasi dalam pendirian toko modern Tomira, namun sayangnya ruang sebesar 20% tersebut sampai sekarang belum tercapai atau belum maksimal, hal ini dikarenakan produk lokal yang belum ada atau belum memenuhi syarat. Selain masalah masih kurangnya ruang bagi produk lokal, perkembangan

produk lokal pelaku UKM Kabupaten Kulon Progo tidak dapat secepat produk-produk di toko modern waralaba, yang mudah terkenal di masyarakat.

**c. Kendala Koperasi dalam menjalankan Toko Modern Tomira**

Koperasi sebagai pemilik toko modern pun mengalami kesulitan dalam mengelola toko modern ini pada awalnya, yakni mengenai perpajakan. Mulanya koperasi Kabupaten Kulon Progo tidak terlalu mengenal akan pembayaran pajak dalam menjalankan kegiatan koperasinya, sehingga perpajakan merupakan salahsatu perihal yang tidak dimengerti oleh koperasi terkait, terlebih mayoritas anggota koperasi mayoritas adalah orang-orang berusia lanjut, ini menjadi kendala koperasi dalam menjalankan toko modern Tomira, disamping itu toko modern Tomira menjalin kerjasama dengan Alfamart dan Indomaret sebagai *supplier* yang sudah tidak asing akan perpajakan, karena kedua *brand* toko modern ini sudah tergolong perusahaan besar, sehingga mau tidak mau pajak sudah pasti merambah masuk ke toko modern Tomira, selain itu dari segi omzet koperasi dalam menjalankan toko modern Tomira sudah lebih dari 4,8 miliar rupiah, sehingga pihak koperasi dikenakan PKP atau Pengusaha Kena Pajak sebesar 10% yang harus dibayarkan setiap bulan ke kas negara, tentu disamping

minimnya pengetahuan akan perpajakan ini, pengenaan perpajakan ini dirasa memberatkan pihak koperasi.

### **3. Solusi untuk mengatasi kendala pelaksanaan kerjasama UMKM TOMIRA dengan toko modern**

Walaupun tidak semua kendala yang ditemui dapat diatasi, adapun beberapa solusi atau upaya yang telah dilakukan atas kendala-kendala tersebut peneliti uraikan dibawah ini:

#### **a. Mengenai tulisan “Alfamart maupun Indomaret”**

Bahwa pelanggaran pemasangan tulisan “Alfamart” sempat dilakukan peneguran kepada pihak *supplier* (Alfamart), namun nyatanya tindakan pemasangan tulisan dari *brand* toko waralaba tersebut masih sering dilakukan secara diam-diam oleh mereka (Alfamart maupun Indomaret), sehingga perlu kesadaran tinggi bagi pihak terkait agar tetap terjalinnya kerjasama yang baik, mengingat mereka (Alfamart dan Indomaret) merupakan *supplier* barang di Tomira.

#### **b. Mengenai Bahan Baku**

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo telah melakukan sosialisasi, agar dilakukannya inovasi atau pengembangan produk, yang mana produk yang diolah oleh para pelaku UKM bukan hanya dari 1 jenis bahan baku saja, melainkan terdapat beberapa produk dari bermacam-macam bahan baku yang dapat diolah menjadi 1 jenis produk yang sama



atau bahkan berbeda-beda, sehingga apabila seorang pelaku UKM mengalami kesulitan bahan baku, pelaku UKM tersebut tetap bisa mengirimkan produk hasil olahannya ke toko modern Tomira, selain itu dengan adanya inovasi produk, perekonomian akan tetap berjalan.

**c. Mengenai Penyediaan 20% bagi Produk Lokal**

Salahsatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar produk lokal dapat dikenal secara meluas datang langsung dari Bupati Kulon Progo, yakni Hasto Wardoyo, produk lokal yang sempat dipromosikan langsung oleh Bupati ialah air mineral bermerek AirKU, mulanya Bupati mengkritik PDAM sebagai Perusahaan Daerah Air Minum yang justru tidak memiliki produk air minum sendiri, atas kritikan tersebut Bupati memberikan waktu 6 bulan kepada PDAM untuk berupaya membuat air minum sendiri, akhirnya PDAM berhasil memproduksi air mineral dalam kemasan yang bermerek AirKU, yang artinya Air Kulon Progo.

Bupati Kulon Progo mewajibkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Kulon Progo untuk mengkonsumsi produk sendiri, seperti AirKU. Beliau, Bupati Kulon Progo juga menghimbau masyarakat Kulon Progo yang memiliki acara-acara besar untuk menggunakan AirKU, dari sanalah AirKU semakin dikenal oleh masyarakat, bahkan air

mineral dari Kulon Progo ini telah masuk ke pasar regional DIY-Jawa Tengah.

**d. Mengenai Perpajakan**

Bahwa Dinas Koperasi dan UMKM telah memfasilitasi dengan mengundang pihak perpajakan untuk melakukan sosialisasi kepada sejumlah koperasi yang menjalankan toko modern Tomira untuk sama-sama belajar mengenai aturan perpajakan.

**D. KESIMPULAN**

**1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2010 oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengatur Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang berupa TOMIRA**

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telah mengupayakan pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagaimana prinsip dan tujuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2010 melalui UMKM toko modern Tomira yang diperkuat dengan adanya produk hukum pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Berdasarkan analisa data dan hasil wawancara yang sudah dipaparkan di atas, meski UMKM Tomira merupakan perwujudan kebijakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011, tidak dapat

dipungkiri bahwa Peraturan Bupati tersebut merupakan muara bagi adanya koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

**2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama UMKM Tomira dengan toko modern di wilayah Kabupaten Kulon Progo**

Bahwa yang mendasari kendala para pihak terletak pada kesadaran diri masing-masing, baik oleh pihak *supplier*, pelaku UKM, pihak koperasi dan bahkan Pemerintah Daerah sendiri yang dirasa kurang tegas dalam membuat perjanjian kerjasama koperasi dalam pendirian toko modern Tomira, hingga perjanjian penyediaan 20% produk lokal di toko modern Tomira tidak terealisasi hingga saat ini.

**3. Solusi untuk mengatasi kendala pelaksanaan kerjasama UMKM TOMIRA dengan toko modern**

Untuk mengatasi kendala pelaksanaan kerjasama UMKM Tomira tersebut baik dari pelaku UKM hingga pemerintah daerah telah berusaha untuk meminimalisir kendala yang ada meskipun tidak seluruh kendala-kendala yang terjadi dapat diatasi, beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya ialah: melakukan teguran atas pemasangan liar *brand* toko modern waralaba, melakukan sosialisasi akan pengembangan produk, menghimbau masyarakat lokal untuk menggunakan produk lokal sendiri (seperti AirKU), memfasilitasi pihak terkait dengan mengundang langsung dari sumbernya (seperti mengundang pihak perpajakan untuk belajar bersama dengan koperasi).

## **E. SARAN**

1. Sebagai peraturan daerah yang mengatur mengenai UMKM, sebaiknya dalam peraturan daerah ini perlu adanya perincian mengenai berapa banyak produk lokal yang harus disediakan oleh pelaku usaha, agar tujuan daripada peraturan daerah tersebut dapat tercapai secara maksimal, hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014, yang untuk melindungi produk-produk lokal diwajibkan paling sedikit 80% produk UMKM untuk dipasarkan di Tomira dan barang-barang Alfamart paling banyak 15% dari keseluruhan jumlah dagangan yang dijual didalam outlet/gerai toko modern.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, sebagai pemegang kekuasaan, pemerintah daerah memiliki peran besar untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kerjasama UMKM Tomira, yakni dengan menciptakan produk hukum, dengan begitu akan adanya upaya paksa yang dirasa, sehingga masalah-masalah yang ada dapat diminimalisir. Kemudian untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka alangkah baiknya apabila pemerintah turun langsung dalam memberikan bantuan finansial kepada pelaku-pelaku UKM, serta mempermudah prosedur dalam pembuatan perizinan suatu produk. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa di zaman sekarang ini nilai suatu mata uang sangat kecil untuk

dimanfaatkan, bahkan kadangkala tidak ada nilainya, hal itu tentu mempersulit para pelaku usaha khususnya UKM untuk mengembangkan produknya.

3. Kepada pihak koperasi selaku pemilik toko modern Tomira, serta pemerintah daerah sebagai perangkat daerah untuk kedepannya lebih tegas terhadap relasi kerja (dalam hal ini Alfamart maupun Indomaret) agar mematuhi hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama, saling menghormati sesama pelaku usaha dalam mengembangkan usaha. Gencar melakukan sosialisasi kepada pelaku UKM akan pengembangan-pengembangan produk yang bernilai ekonomis, menggalakkan budaya beli produk lokal. Mengenalkan produk lokal ke luar daerah, agar produk lokal Kulon Progo dapat bersaing secara nasional bahkan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Arikunto, Suharsimi. (2002). *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek”*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daman, Rozikin. (1993). *Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Garna, Judistira K. (2000). *Ilmu-ilmu Sosial Konsep Sisi*. Bandung: Pasca Sarjana UNPAD.
- Gie, The Liang. (1968). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lubis, M. Solly. (1989). *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: Mandat Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Mazmanian, Daniel A & Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foreman and Company.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. (2000). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Komputindo.
- Prakoso, Djoko. (1985). *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pranawati, Rita & Irfan Abubakar. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Santoso, Purwo. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government.
- Subardjo. (2014). *Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Cetta Media.
- Subandi. (2015). *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1996). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suryabrata, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Reori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tohar, M. (2000). *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius.

## **B. Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.



Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**C. Jurnal:**

Muh. Hasrul. (2015). Jabaran Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Supermasi*, 10(1).

Sentot Harman Glendoh. (2001). Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*. 3(1).

**D. Website:**

Badan Pusat Statistika. Diakses pada 07 Agustus 2019 dari <https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html>.

Ciri-ciri Negara Hukum Menurut Para Ahli Hukum. Diakses pada 26 Agustus 2019 dari <https://www.katamasa.com/ciri-ciri-negara-hukum-menurut-para-ahli/>

Damang Averroes Al-Khawarizmi. Negara Hukum Pancasila. Diakses pada 26 Agustus 2019 dari <http://www.negarahukum.com/hukum/negara-hukum-pancasila.html>.

Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2018. Diakses pada 19 Agustus 2019 dari <https://kulonprogokab.bps.go.id/publication/2018/08/16/66fca2325862845af2c83700/kabupaten-kulon-progo-dalam-angka-2018.html>.

Kondisi Umum Kulon Progo. Diakses pada 18 Agustus 2019 dari [https://kulonprogokab.go.id/v3/portal/index.php/web/view\\_detil/6/kon disi-umum#brand](https://kulonprogokab.go.id/v3/portal/index.php/web/view_detil/6/kon disi-umum#brand).

Pengertian UMKM Secara Umum dan Menurut Para Ahli Lengkap. Diakses pada 11 September 2019 dari <https://www.idpengertian.com/pengertian-umkm-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-lengkap/>.

Sedikit Penjelasan Mengenai Koperasi. Diakses pada 11 September 2019 dari

<https://www.kompasiana.com/yohn/57d36e792b7a6182078b4567/sedikit-penjelasan-mengenai-koperasi?page=all>.